

Islamisme dalam Prahara Konflik : Potret Politik Islam di Timur Tengah

Aji Cahyono

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

aji.cahyono96.ac@gmail.com

Keyword

Islamisme, Timur Tengah, Politik Islam, Konflik

Abstract

Tulisan ini menggambarkan potret Islamisme atau Dunia Islam terjebak dalam prahara konflik Kawasan Timur Tengah. Spekulasi Barat terhadap Islamisme mengenai isu keagamaan yang ekstrimisme-eksklusif yang bermuara pada terorisme. Adapun tujuan penulisan ini mendeskripsikan pertama, fenomena Timur Tengah dalam Prahara; kedua, mendeskripsikan Islamisme dalam perdebatan, ketiga, fenomena Islamisme di Kawasan Timur Tengah sebagai Gerakan Politik Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Sedangkan pengambilan data bersumber dari beberapa buku dan artikel media yang bersifat kontemporer. Adapun poin terpenting yakni: *pertama*, konflik Timur Tengah karena adanya benturan kepentingan antara Dunia Islam dan Barat; *Kedua*, perbedaan cara pandang mengenai pemahaman Islamisme; *Ketiga*, Islamisme dalam Gerakan Politik Islam Kawasan Timur Tengah, sebagai bentuk protes terhadap hegemoni Barat.

*correspondence Author: Aji Cahyono email: aji.cahyono96.ac@gmail.com



© 2024. The author(s). Published by Tribakti Press. This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Diskursus tentang dunia Islam tak habis menjadi perhatian penting kalangan akademisi maupun intelektual. Yang mana, dunia Islam dihantui dengan fenomena konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai, terkhusus kawasan Timur Tengah maupun aktor yang berasal maupun mendiami pada wilayah tersebut. Sejumlah kalangan kesarjaanaan Barat (orientalis) menginterpretasikan bahwa dunia Islam diambang prahara, dan menciptakan benih-benih ekstrisme-eksklusif hingga bermuara pada gerakan terorisme. Misalnya, fenomena penyerangan Al-Qaeda terhadap Amerika Serikat dengan melancarkan aksinya mengebom WTC di New York, pada 11 September 2001 atau yang dikenal dengan peristiwa WTC 9/11.

Guru Besar Politik Internasional Universitas Harvard, Samuel P. Huntington berargumen tentang peristiwa WTC 9/11 yang merupakan benturan kebudayaan dengan mencerminkan Barat melakukan perlawanan terhadap kelompok militan Islam yang dikenal sebagai teroris (Huntington, 1996). Sehingga kedaulatan negaranya terancam, Amerika Serikat melakukan *counter attack* pada tahun 2003, pelancaran aksi militer dengan menginvasi Afghanistan dan Irak dengan mencari dan menyelidiki posisi pimpinan dari Al-Qaeda, Osama bin Laden yang diduga menjadi dalang penyerangan aksi 9/11, serta sebagai organisasi berkedok Islam terorisme.

Meskipun tesis Huntington mengundang kontroversi dan menghebohkan jagad dunia, dan munculah persepsi adanya benturan Barat dan Timur. Pasalnya dikenal masih parsial dan tidak mencakup kajian komprehensif. Kritik tajam dari Profesor Sosial Antropologi Universitas Boston, Amerika Serikat. Robert W. Hefner, dalam forum diselenggarakan oleh Lemhambhas pada acara Geopolitical Forum V, 21 Oktober 2021 di Jakarta. Kritiknya bahwa pernyataan Huntington adalah salah dan tidak adanya penggambaran sinergi lintas peradaban. Ia mencontohkan Indonesia menjadi Negara Timur, dengan aneka ragam kebudayaan yang amat luar biasa memiliki banyak kelebihan dalam merawat dan menjaga keberagaman yang dirajut dalam persatuan Indonesia. Ia menyebutkan Indonesia hebat ditengah kerumitan dunia yang luar biasa. (Permatasari, 2021).

Buku *The Clash of Civilization* mengenai benturan antara Timur (Dunia Islam) dan Barat, menurut Hefner, mendapatkan sorotan kritik tajam. Pasalnya temuan Huntington mengenai benturan peradaban, sangat kontras dengan kondisi di Indonesia; (Adiwidya, 2021). Misalnya yakni: *Pertama*, Indonesia dapat membuktikan kolaborasi antara institusi keagamaan dan pemerintahan. Sebaliknya, Amerika Serikat sangat percaya bahwa kunci keberhasilan adalah pemisahan kedua institusi tersebut. Namun Indonesia menjadi contoh kolaborasi yang tepat dalam sistem pluralisme. Menurutnya, agama tidak hanya berkontribusi tapi juga meningkatkan dan memperkuat demokrasi, kerakyatan, kebhinekaan. *Kedua*, muslim, pendidik, dan pemimpin politik mampu menjadikan contoh kolaborasi yang baik bagi masyarakat dan dunia. Agama meningkatkan dan memperkuat demokrasi dan kerakyatan. *Ketiga*, angkatan bersenjata Indonesia berperan positif dalam kembalinya negara ke sistem demokrasi. Membandingkan militer Indonesia dan Mesir pada 1998 dan Arab Spring 2010.

Ternyata pasukan angkatan bersenjata Indonesia dapat bertindak dengan bijaksana, Militer Indonesia mendukung reformasi pemilu dan legislatif.

Tesis Huntington juga bersebrangan dengan Osman Bakar, menempatkan Dunia Islam (Muslim) sebagai “bangsa tengah”, yang merupakan jembatan Barat dan Timur, Utara dan Selatan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa posisi Islam berada di tengah-tengah, bukan terjebak pada sektarian kewilayahan belaka. (Bakar et al., 2003). Gagasan tentang bangsa tengah menjadi kunci dalam memahami sifat dan identitas peradaban Islam. Dengan kata lain, kesadaran peradaban berakar mendalam dalam ide-ide Qur’ani sebagai keturunan manusia pada umumnya, humanitas umum, kebaikan universal manusia, universalitas kasih tuhan terhadap ras manusia, kearifan pluralisme etnik dan kultural, kooperasi inter-kultural, keadilan sosial global, tanggungjawab umum (Bakar et al., 2003).

Studi mengenai Islamisme dan Dunia Islam mengalami perkembangan yang kompleks, berdasarkan beberapa literatur yang ada. Meskipun fenomena konflik dalam dunia Islam selalu dikaitkan dengan ilmu politik. Hal ini disayangkan, karena kontur sebenarnya dari tantangan Islam, baik di mana ia sesuai dengan norma-norma sejarah dan di mana ia menyimpang dari mereka, dapat dipahami hanya dalam kerangka komparatif yang lebih luas, dan ilmu politik di ujung jarinya memiliki badan penelitian yang mengesankan yang mampu memberikan pembelian analitis yang signifikan pada fenomena tersebut. (Berman, 2003). Meskipun Islam dijadikan sebagai instrument dalam sebuah sistem negara yang melekat, seperti halnya di Pakistan (sebagai respon kritik pemerintahan yang bersifat militer (Hassan, 1985).

Melihat uraian dari latarbelakang pernyataan sebelumnya. Penulis akan menguraikan secara teoritik mengenai Islamisme maupun dunia Islam sebagai fakta atau kejadian yang ada. Secara umum, bahwa Islamisme mengacu pada budaya, agama, atau regional: sifat peradaban Arab, ajaran Islam, konflik Arab-Israel. Perlakuan ilmiah dari subjek, lebih sensitif terhadap masalah dengan menggunakan variabel yang luas dan stabil untuk menjelaskan fenomena beraneka ragam dan berkembang, telah menggali lebih dalam dan secara tanggap menganalisis gerakan-gerakan Islam tertentu dan rezim yang mereka hadapi.

Metode

Dalam topik ini, penulis berupaya mengkaji mengenai Islamisme sebagai perdebatan teoritis sekaligus sebagai spirit dalam wacana gerakan politik kelompok Islam terkhusus secara (intra/antar) Negara Timur Tengah. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analitis deskriptif. Adapun dalam pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggali fenomena atau peristiwa Islamisme, baik secara intra/antar Negara di Kawasan Timur Tengah.

Hasil dan Pembahasan

Posisi Timur Tengah Dilematis

Timur Tengah merupakan kawasan yang potensi konfliknya tergolong tinggi. Karena kawasan Timur Tengah tak lain adalah melimpahnya sumber daya Alam yang melimpah. Misalnya, Kawasan Timur Tengah tak hanya melimpah Sumber Daya Manusia (SDM), melainkan yakni ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Bahkan, bisa dikatakan sebagian besar produksi dan ekspor minyak bumi dunia berkontribusi besar. Meskipun, interaksi intra-regional masih lemah, terutama terbatas pada arus tenaga kerja, dan terbatasnya perdagangan barang dan jasa (*Growth and Stability in the Middle East and North Africa -- Economic Overview*, n.d.).

Disisi lain, Kawasan Timur Tengah (mencakup Afrika Utara, dengan wilayah luas lebih dari 15 juta kilometer persegi dan menampung sekitar 6 persen populasi dunia, interaksi intra-regional masih lemah, terutama terbatas pada arus tenaga kerja, dan terbatasnya perdagangan barang dan jasa. Tiga negara terkecil (Bahrain, Djibouti, dan Qatar) masing-masing memiliki populasi sekitar setengah juta jiwa. Sebaliknya, dua negara terbesar (Mesir dan Republik Islam Iran) masing-masing berpenduduk sekitar 60 juta jiwa. Bersama dengan Aljazair, Maroko, dan Sudan, lima negara dengan populasi terpadat ini mencakup sekitar 70 persen populasi di wilayah tersebut. Sekitar setengah populasi tinggal di kota.

Melihat potensi di Kawasan Timur Tengah, sehingga menjadi perebutan pengaruh oleh negara adidaya yang didominasi oleh bangsa Barat. Dengan kompleksitasnya, bahwa Timur Tengah (bahasa inggrisnya: *Middle East*) segala dinamika yang ada, bahwa memahami kawasan Timur Tengah tergolong sulit, jika dianalisis oleh beberapa pengamat yang beredar di beberapa penjuru dunia. Meskipun kajian Timur Tengah didominasi oleh kalangan kesarjana Barat (atau yang dikenal sebagai Orientalis). Tak hanya itu, Definisi “Timur Tengah” atau disebut sebagai “Timur Dekat” menemui jalan buntu dengan kesepakatan diantara negara negara yang berkepentingan. Bahkan, kalangan ahli politik internasional (diplomata maupun media massa) belum ada kesamaan mengenai definisi “Timur Tengah”, juga mengenai bangsa, negara dan kawasan mana yang dapat dimasukkan dalam kategori kawasan “Timur-Tengah”.

Bahkan kajian orientalis (Barat) memahami Timur (yang cenderung mayoritas Muslim) tidak berimbang. Pasalnya, sejarah mencatat bahwa politik penjajahan yang dilakukan oleh Barat sangat berpengaruh kuat dalam membangun citra Barat terhadap dunia Timur, khususnya Islam dari sudut pandang praksis atau analitik. (Teng, n.d.) Analitik yang dibangun oleh Barat tentang pandangannya terhadap masyarakat Timur atau yang dikenal sebagai *oriental society*, dalam kajian orientalisme menempatkan posisi Barat sebagai blok yang progresif, sedangkan posisi Timur dinilai stagnasi (tak ada kemajuan), terutama bangsa yang ada di kawasan Timur Tengah tersebut (Sihbudi, 2007).

Meskipun didominasi oleh Barat mengenai kajian Timur Tengah. Menurut Sihbudi, sejumlah ahli politik internasional memformulasikan pemetaan dan keberadaan kriteria masuk kedalam kawasan Timur Tengah dalam tiga pendapat sebagai berikut: *Pertama*, Sebagai kawasan yang mencakup negara-negara Arab non-Afrika di tambah Iran dan Israel. Dalam

pengertian ini, negara-negara seperti Aljazair dan Maroko tidak termasuk dalam kategori Timur-Tengah; *Kedua*, Suatu kawasan yang negaranya terdiri dari seluruh negara anggota Liga Arab ditambah Iran, Israel dan Turki. Jadi seluruh negara (berbahasa dan berbudaya) Arab di kawasan Afrika Utara (seperti Aljazair, Maroko, Libya, Mauritania) masuk dalam kategori Timur-Tengah; dan *Ketiga*, Suatu kawasan yang terdiri atas negara-negara seperti pandangan kedua di atas, ditambah dengan Afghanistan, Pakistan dan beberapa negara Republik Muslim di Asia Tengah bekas Uni Soviet (Sihbudi, 2007).

Meskipun secara umum, pandangan historis menekankan Timur Tengah sebagai kawasan yang melahirkan beberapa “mukjizat sekaligus menjadi kawasan yang menjadi kiblatnya kerohanian, pasalnya ditengarai secara historis menunjukkan bahwa agama-agama yang mempengaruhi struktur masyarakat di dunia merupakan agama besar yang lahir di Timur Tengah, serta dirasakan pengaruhnya. Namun, disisi lain menunjukkan bahwa kawasan di Timur Tengah sarat akan menjadi konflik kepentingan negara negara intra kawasan dan Barat pasca ditemunya minyak dibawah tanah yang tandus dan berpasir sekitar tahun 1930-an. Seketika Timur-Tengah dipandang sebagai “kekuatan baru dan strategis” yang mulai diperbincangkan, terutama dalam percaturan politik praktis global. (Ruslin, 2013)

Islamisme dalam Perdebatan Definisi

Yang menjadi sorotan hingga saat ini, bahwa narasi Islamisme memperlakukannya hanya dalam istilah kebangkitan agama, atau sebagai ekspresi loyalitas primordial, atau tindakan kelompok yang irasional, atau sesuatu yang aneh dan unik, sebuah fenomena yang tidak dapat dianalisis oleh kategori ilmu sosial konvensional. Faktanya, Islamisme sebagian besar telah dikecualikan dari mode penyelidikan yang dikembangkan oleh para ahli teori gerakan sosial di Barat. Hingga saat ini, ketika segelintir sarjana telah berusaha untuk membawa aktivisme Islam ke dalam ranah teori gerakan sosial.

Tentunya, perkembangan yang disambut baik. Namun, para sarjana ini cenderung "meminjam" dari teoritikus, daripada terlibat secara kritis dan produktif, yang berkontribusi pada teori-teori gerakan sosial. Memang, masih menjadi pertanyaan sejauh mana teori gerakan sosial yang berlaku mampu menjelaskan kompleksitas gerakan sosial-keagamaan dalam masyarakat Muslim kontemporer, terutama ketika perspektif ini berakar pada silsilah tertentu, dalam perbedaan yang sangat tinggi. dan masyarakat Barat yang terbuka secara politik, di mana gerakan sosial sering berkembang menjadi entitas yang sangat terstruktur dan sebagian besar homogeni kemungkinan yang terbatas di dunia non-Barat (Bayat, 2013).

Pengaruh Islamisme Timur Tengah telah melampaui negara asal dengan membentuk jaringan transnasional. Hal itu berdampak pada politik global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kegagalan Islamisme untuk menunjukkan tatanan yang demokratis dan inklusif telah memunculkan gerakan-gerakan yang baru berkembang, sehingga Asef Bayat mencoba menggunakan “post-Islamisme”, yang dapat membentuk kembali peta politik wilayah tersebut jika mereka berhasil. Bukan anti-Islam atau sekuler, tetapi dipelopori oleh Muslim yang saleh, post-Islamisme mencoba untuk membatalkan

Islamisme sebagai proyek politik dengan menggabungkan iman dan kebebasan, negara demokratik sekuler dan masyarakat religious (Bayat, 2013).

Bayat mencoba menggunakan istilah Islamisme dalam bukunya, sebagai bentuk penegasan untuk memobilisasi mereka (sebagian besar kelas menengah yang berprestasi tinggi) yang merasa terpinggirkan oleh proses ekonomi, politik, atau budaya yang dominan dalam masyarakat, mereka yang dianggap gagal. Modernitas kapitalis dan utopia sosialis menjadikan bahasa moralitas, melalui agama, sebagai pengganti politik. Dalam arti, cara kelas menengah Muslim untuk mengatakan “tidak” pada apa yang mereka anggap sebagai pengecualian elit nasional mereka, pemerintah sekuler, dan sekutu Barat pemerintah tersebut. Islamis (orang yang menjalankan aktivitas islamisme) menolak “dominasi budaya Barat”, alasan politik, kepekaan moral, dan simbol normatifnya, meskipun mereka memiliki banyak kesamaan fitur—dasi, makanan, pendidikan, dan teknologi. Sebaliknya, mereka yang menikmati dan makmur di bawah kondisi sosial ekonomi dan budaya modern globalisasi, jika mereka tidak sekuler, menganut jenis Islam yang berbeda, yang disebut Islam moderat, atau lebih tepatnya, "kesalehan pasif" (Bayat, 2013).

Dalam upaya untuk beroperasi dalam ideologi nativis "otentik", Islamis mencoba mengartikulasikan versi Islam yang dapat menanggapi defisit politik, ekonomi, dan budaya mereka. Dengan demikian, Islamisme membayangkan Islam sebagai sistem ilahi yang lengkap dengan model politik yang unggul, budaya kode, struktur hukum, dan pengaturan ekonomi—singkatnya, sistem yang menjawab semua masalah manusia. Lebih penting lagi, Islam ini menawarkan kepada umat Islam tentang rasa harga diri, kepercayaan diri, dan otonomi yang luas. Disertai dengan populis yang kuat, bahasa dan kontrol sosial yang berat, interpretasi Islam mau tidak mau akan meminggirkan dan bahkan mengkriminalisasi mereka yang tetap berada di luar batasannya: (misalnya non-konformis, sekuler, Muslim non-Islam, agama minoritas, dan banyak perempuan). Oleh karena itu posisi sebagai masyarakat sipil dalam pusaran ajaran Islamisme, harus meletakkan campuran kesalehan dan kewajiban, pengabdian dan tugas yang dibuat dalam negara tersebut (Bayat, 2013).

Noorhaidi Hasan menggambarkan bahwa Islam politik digunakan istilah umum yang dipertukarkan dengan Islamisme. Yang dimaksud adalah sebagai alternatif dari istilah fundamentalisme, berasal dari tradisi Kristen, yang bersifat religius. (Hasan, 2006) Kendati demikian, beberapa kalangan sarjana Barat menggunakan istilah ‘Islam Politik’ pada wacana dan aktivisme dengan memandang Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologi politik, di mana sebuah negara Islam, atau setidaknya masyarakat Islam yang ditandai dengan penghormatan dan kepatuhan yang tinggi terhadap Islam dengan cara syariah ditegakkan.

Dari sudut pandang inilah, Islam politik merupakan proyek religio-politik yang berupaya agar Islam tidak hanya terwakili dalam negara, tetapi juga menjadi sebuah sistem komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Hal demikian dipahami sebagai bentuk interaksi antara agama dan politik. Faktanya, Islam politik telah memanifestasikan dirinya dalam banyak cara, mulai dari penegasan identitas parokial hingga upaya penuh darah

untuk merekonstruksi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Fischer, 2003; Keddie & Afgānī, 1983).

Fenomena Islamisme di Timur Tengah

Islamisme menjadi stereotip negatif kalangan sarjana Barat, dalam melancarkan aksi terornya. Gilles Kepel menggambarkan serangan aksi yang dilakukan oleh rezim Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak yang merupakan Negara Islam, dengan tujuan menghancurkan Al Qaeda di Afghanistan dan melenyapkan rezim Saddam Hussein di Irak akan mendorong lahirnya demokrasi di seluruh Timur Tengah (Kepel & Ghazaleh, 2008). Hanya dengan tampil di panggung, demokrasi akan menyebabkan runtuhnya teokrasi anti-Amerika di Iran dan akan melemahkan rezim otoriter Timur Tengah, di mana militan Islam yang mengkhotbahkan jihad perang suci telah mengalihkan perhatian massa dari korupsi para pemimpin mereka dan telah menghasilkan sembilan belas pembajak 9/11. Di bawah hegemoni Amerika Serikat yang menang, orang-orang Arab dan Muslim akan melihat kepentingan terbaik mereka dalam pengakuan regional atas hak Israel untuk hidup, dan tanah yang dianggap suci oleh tiga agama kuno akan menemukan tempatnya dalam skema globalisasi yang harmonis.

Selain itu, berkaca dari teori yang dibangun oleh Huntington, dapat menginspirasi dari salah satu kelompok Rencana Strategis Militer Nasional untuk Perang Melawan Terorisme atau *National Military Strategic Plan for the War on Terrorism* (NMSP-WOT) yang baru-baru ini diterbitkan patut dipuji karena mengidentifikasi “ideologi” sebagai pusat gravitasi al Qaeda. (Col. D. Eikmeier, 2017) Dalam hal ini bahwa identifikasi ideologi menjadi pusat gravitasi daripada individu atau kelompok merupakan perubahan signifikan dari filosofi “tangkap dan bunuh” ke strategi yang berfokus pada mengalahkan akar penyebab terorisme Islam. Oleh karena itu, fokus utama rencana tersebut adalah menyerang dan melawan ideologi yang memicu terorisme Islam. Sayangnya, NMSP-WOT gagal mengidentifikasi ideologi atau menyarankan cara untuk melawannya. Rencana itu hanya menggambarkan ideologi itu sebagai “ekstremis.” Deskripsi ini memberikan sedikit kontribusi untuk pemahaman publik tentang ancaman atau kemampuan ahli strategi yang pada akhirnya harus menyerang dan mengalahkannya (D. C. Eikmeier, 2007).

Dalam versi NMPS-WOT, mengetahui musuh membutuhkan pemahaman tentang ideologi Islam militan dan mengakui bahwa itu adalah “pusat gravitasi” militan. (Col. D. Eikmeier, 2017) Ideologi ekstremis mereka telah disebut banyak hal, “Islam Militan,” “Salafisme,” “Islamisme,” “Wahabisme,” “Qutbisme”, “Jihadisme”, dan bahkan “Islam”. Karena sebagian besar ideologi mencerminkan integrasi berbagai konsep, teori, dan tujuan terkait yang telah berkembang dari waktu ke waktu ke dalam kerangka pemikiran yang lebih luas, tidak ada label yang sepenuhnya sempurna dan semuanya benar-benar sempurna. tunduk pada kritik. Namun, tampaknya Presiden Bush telah mengakhiri perdebatan dan menerima “Islam-Fasisme” sebagai label ideologis. (*CNN.Com - Bush: U.S. at War with “Islamic Fascists” - Aug 10, 2006*, n.d.) Sementara, Islam-Fasisme segera memunculkan citra kejahatan untuk dilawan dan oleh karena itu berguna sebagai istilah hubungan masyarakat, secara

intelektual ia tidak banyak berarti bagi para pelajar Islam yang serius atau para perencana strategis yang dituduh telah mengalahkannya.

Seperti halnya, Afghanistan memerangi Tentara Merah pada 1980-an, strategi bom bunuh diri tidak diketahui. Tetapi pada tahun 2005 ada 25 serangan semacam itu di Afghanistan, dan 136 pada tahun 2006; 2007 terjadi jumlah operasi bunuh diri yang hampir sama, dan lebih dari 6.000 orang kehilangan nyawa mereka sebagai akibat dari kekerasan politik. Strategi ini berjalan seiring dengan penculikan orang asing—seorang jurnalis Italia dan dua pekerja bantuan Prancis pada awal 2007 dan anggota kelompok evangelis Korea Selatan pada Juli. Kisah-kisah pembantaian dan pemerasan ini sangat mirip dengan yang mengalir keluar dari Irak dan membayangi keberhasilan awal perang di Afghanistan. Kemudian pada tanggal 27 April 2008, Presiden Hamid Karzai nyaris lolos dari upaya pembunuhan di parade militer di Kabul— serangan yang sangat mengingatkan pada pembunuhan Anwar Sadat di tangan kelompok radikal Islam pada Oktober 1981 di Kairo. Operasi ini merupakan pengingat akan kapasitas kelompok-kelompok Taliban yang telah diubah untuk menyerang jantung pemerintah Afghanistan yang pro-Barat dan sebuah tanda serius dari kelemahan militer dan politik pemerintah Karzai (Kepel & Ghazaleh, 2008).

Meskipun demikian, wacana perang melawan teror adalah jihad, atau perang suci, yang telah dinyatakan oleh kaum radikal Islamis melawan orang-orang kafir Barat dan para kolaborator Muslim mereka. Didasarkan pada perintah ilahi dan mencapai pendewaannya dalam kesyahidan, jihad menurut definisi adalah perang yang adil, dari sudut pandang mereka yang mempercayainya. Ia berusaha untuk membasmi para pelaku kejahatan dari tanah Muslim ("tentara salib" Amerika, sekutu Zionisnya Israel, dan kepala negara pro-Barat di Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara lain) dan untuk mengubah adegan Timur Tengah dengan mendirikan negara-negara yang diatur oleh Islam. hukum (syariah). Dalam narasi ini, "serangan ganda yang diberkati pada 11 September" adalah pertanda kemenangan akhir Islam atas Barat yang merosot (Kepel & Ghazaleh, 2008).

Selain itu, Islamis di Irak sangat berbeda dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, FIS di Aljazair, atau pendukung Khomeini di Iran. Di Baghdad, Islamisme Sunni mewakili puncak sentimen anti-Syiah, dan sebaliknya. Kompetisi keagamaan ini diterjemahkan ke dalam tanda-tanda nyata, seperti jilbab, yang mengikuti norma Iran untuk wanita Syiah dan norma Saudi untuk Sunni. Yang paling penting, keinginan masing-masing pihak untuk milisi bersenjata memungkinkan kekerasan untuk memberi makan dirinya sendiri, kehilangan hubungan dengan tujuan awal pemberontakan (Kepel & Ghazaleh, 2008).

Misalnya, pergolakan politik di Mesir, ketika Hosni Mubarak menggantikan Anwar Sadat pada tahun 1981, negara Mesir umumnya menanggapi tantangan Islam dengan strategi dua arah, menindak keras ekstremis gerakan itu sambil mencoba mengkooptasi kaum moderat dan memoles kredensial Islamnya sendiri. Ini berarti, selain represi brutal, "kemunduran rezim dari politik dan budaya sekuler." (Ajami, 1999) Retorika agama mulai mewarnai wacana politik resmi, dan "posisi dan argumen yang dianut oleh pesaing politik yang berbeda, termasuk peringkat atas pejabat negara, sekarang sering dibenarkan atau diserang dengan mengacu pada teks-teks dari al-Qur'an atau Hadis" (Zaki, 1995). Selain itu,

Islamis mosderat diberi akses ke sumber daya negara, khususnya media (yang sering mereka gunakan untuk mencerca sekularisme dan menganjurkan sebuah negara Islam) (Zaki, 1995). Kekuatan pusat pembelajaran Islam terkemuka di Mesir, Universitas al-Azhar, juga berkembang pesat: “Sebagai imbalan untuk menganugerahkan legitimasi Islam pada negara (yang dimaksud yakni para petinggi al-Azhar) merumuskan tuntutan untuk Islamisasi masyarakat, terutama di bidang moral dan budaya” (Kepel, 1986, p.19). Mereka juga mempromosikan Islamisasi kurikulum sekolah dan mengambil keputusan untuk menilai secara lebih umum tentang apa yang orang Mesir membaca, melihat, dan belajar.

Kesimpulan

Timur Tengah menjadi Kawasan yang dihantui dengan permasalahan konflik yang kompleks. Terutama dalam hal ini yakni pertarungan antara Barat dalam memberikan pengaruhnya terhadap negara Kawasan Timur Tengah. Namun Sebagian masyarakat Timur Tengah, terutama dunia tidak sepenuhnya menerima ide Barat yang cenderung hegemoni, dan memecah belah persaudaraan. Namun fenomena ini tak lepas kepentingan Barat terhadap kawasan tersebut, karena ketersediaan sumber daya yang melimpah. Barat tentunya mengkritik Islamisme sebagai doktrin gerakan sosial yang terinspirasi dari spirit keagamaan, yang kemudian berpotensi melancarkan aksi ekstrimisme—terorisme. Sedangkan sudut pandang Timur atau dunia Islam, mengkritik kehadiran Barat yang bercorak hegemonik.

Daftar Pustaka

- Adiwidya, A. S. (2021, October 21). *Thesis Samuel Huntington Clash of Civilization Salah*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1279-thesis-samuel-huntington-clash-of-civilization-salah>
- Ajami, F. (1999). *The dream palace of the Arabs: A generation's odyssey* (1. Vintage Books ed). Vintage Books.
- Bakar, O., Khoiri, I., & Fathurrohman SW, O. (2003). *Islam dan dialog peradaban: Menguji universalisme Islam dalam peradaban Timur dan Barat*. Fajar Pustaka Baru.
- Bayat, A. (2013). *Life as politics: How ordinary people change the Middle East* (Second edition). Stanford University Press.
- Berman, S. (2003). Islamism, Revolution, and Civil Society. *Perspective on Politics*, 1(02), 257–272. <https://doi.org/10.1017/S1537592703000197>
- CNN.com—Bush: U.S. at war with 'Islamic fascists'—Aug 10, 2006. (n.d.). Retrieved March 18, 2024, from <https://edition.cnn.com/2006/POLITICS/08/10/washington.terror.plot/>
- Eikmeier, Col. D. (2017, May). *The Center of Gravity, Still Relevant After All These Years?* <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/Online-Exclusive/2017-Online-Exclusive-Articles/The-Center-of-Gravity/>
- Eikmeier, D. C. (2007). Qutbism: An Ideology of Islamic-Fascism. *The US Army War College Quarterly: Parameters*, 37(1). <https://doi.org/10.55540/0031-1723.2340>

- Fischer, M. M. J. (2003). *Iran: From religious dispute to revolution*. University of Wisconsin Press.
- Growth and Stability in the Middle East and North Africa—Economic Overview*. (n.d.). Retrieved March 17, 2024, from <https://www.imf.org/external/pubs/ft/mena/04econ.htm>
- Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, militancy, and the quest for identity in post-new order Indonesia*. Cornell Univ., Southeast Asia Program.
- Hassan, R. (1985). *Islam: Dari Konservatisme sampai Fundamentalisme*. CV. Rajawali.
- Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Simon & Schuster.
- Keddie, N. R., & Afġānġ, Ģamāl-ad-Dġn al-. (1983). *An Islamic response to imperialism: Political and religious writings of Sayyid Jamal ad-Dġn "al-Afġbānġ"* (Repr). University of California Press.
- Kepel, G., & Ghazaleh, P. (2008). *Beyond terror and martyrdom: The future of the Middle East*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Permatasari, C. H. (2021, October 21). *Prof. Dr. Robert W. Hefner: Indonesia Memiliki Peran yang Sangat Positif dalam Era Globalisasi*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1284-prof-dr-robert-w-hefner-indonesia-memiliki-peran-yang-sangat-positif-dalam-era-globalisasi>
- Ruslin, I. T. (2013). Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik). *Jurnal Politik Profetik*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a4>
- Sihbudi, M. R. (2007). *Menyandera Timur Tengah* (Cet. 1). Mizan ; Didistribusikan oleh Mizan Media Utama.
- Teng, H. M. B. A. (n.d.). Orientalis dan Orientalisme Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Ilmu Budaya*, 4(1), 48–63. <https://doi.org/10.34050/jib.v4i1.2324>
- Zaki, M. (1995). *Civil society & democratization in Egypt, 1981-1994*. Konrad Adenauer Stiftung : Ibn Khaldoun Center.